

PERAN PENGELUARAN PEMERINTAH, POPULASI, DAN KUALITAS SDM DALAM MENURUNKAN TINGKAT PENGANGGURAN DI DAERAH BERKEMBANG

Andi Baso Siswadarma¹, Fatmawati², Fakhrul Indra Hermansyah³

^{1,2,3}Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

basosiswadarma10@gmail.com¹, fatmawatiwardihan@yahoo.com²

rulindrasyah@unhas.ac.id³

Abstract

A high rate of unemployment has existed in Barru Regency, a developing region, for nearly twenty years. The purpose of this study is to examine how population growth, government spending, and the quality of human resources all contribute to a lower unemployment rate. The time-series data, which spans the years 2000–2022, was obtained from BPS-Statistics Indonesia and Barru. This study employs a quantitative, econometric methodology with an emphasis on ordinary least squares. The findings of this study demonstrate that the government must be committed to developing strategic policies that prioritize enhancing human quality via health and education in order to lower the unemployment rate. In order to address the elevated rate of unemployment, the government must direct funds towards profitable economic ventures and maintain population control.

Keywords: *Developing Region, Government Expenditure, Human Development Index, Population, Unemployment*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduknya yang setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia sekitar 275,77 juta jiwa dengan jumlah angkatan kerja sebesar 143,72 juta jiwa (BPS, 2024). Peningkatan angkatan kerja tanpa diimbangi dengan kesempatan kerja akan berdampak pada pengangguran.

Berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pengangguran di suatu negara, dapat diketahui bahwa kondisi perekonomian negara tersebut bertumbuh atau mengalami kemunduran. Selain itu dengan tingkat pengangguran dapat dilihat pula ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima masyarakat negara tersebut.

Penduduk Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan yang hampir setara dengan peningkatan jumlah angkatan

kerjanya. Tercatat bahwa tahun 2022 populasi negara berkembang tersebut sebesar 275,77 juta jiwa yang diikuti dengan jumlah angkatan kerja sebesar 143,72 juta jiwa (BPS, 2024). Terdapat kesenjangan dari jumlah populasi dan jumlah angkatan kerja yang tersedia yang berarti bahwa pengangguran cukup tinggi di negara tersebut.

Rendahnya penciptaan lapangan kerja menjadi penyebab utama dari tingginya angka pengangguran di Indonesia (Pitartono & Hayati, 2012). Dengan populasi yang terus meningkat dalam satu tahun, terdapat kesenjangan besar antara masyarakat yang bekerja dan tidak bekerja. Masyarakat yang tidak bekerja bisa saja disebabkan ketidakmampuan kelompok tersebut untuk dapat terpilih ke dalam dunia kerja, atau bahkan mereka tidak menemukan lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuannya (Pitartono & Hayati, 2012).

Salah satu ukuran pengangguran yang digunakan di Indonesia adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Ukuran ini mencakup besaran penduduk usia kerja yang sedang tidak bekerja. Pengangguran terbuka juga mencakup masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha dan mereka yang tidak mencari pekerjaan akibat kemungkinan bahwa mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka telah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Selain itu, di level kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Makassar menjadi kota dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Secara rata-rata, 12,58 persen masyarakat menjadi pengangguran terbuka di Makassar, dan 9,73 persen pengangguran terbuka di Palopo dengan persentase terbesar kedua. Secara khusus, Pare-pare, Barru, Maros, Pangkep memiliki tingkat pengangguran terbuka di atas 5 persen, sisanya berada di bawah 5 persen secara rata-rata (BPS, 2024).

Persentase angka pengangguran tersebut melebihi tingkat pengangguran alamiah yang biasanya berkisar antara 2-3 persen (Sukirno, 2006). Tingkat pengangguran alamiah di sini merujuk kepada sebuah persentase yang sudah semestinya dan tidak dapat dihilangkan dengan metode pengurangan yang ada. Tingkat pengangguran alamiah berkisar antara 2-3 persen yang berarti bahwa perekonomian suatu wilayah saat ini dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) (Sukirno, 2006).

Lebih lanjut, tingkat pengangguran yang tinggi tersebut mengakibatkan dampak yang beragam terhadap sosial-ekonomi. Level pengangguran yang melebihi pengangguran alamiah menyebabkan peningkatan kemiskinan. Hal ini terjadi setelah banyak masyarakat tidak memiliki pendapatan, sehingga masyarakat menjadi semakin sulit

untuk memenuhi kebutuhan dasar yang pada saat yang sama terus mengalami peningkatan dalam aspek biaya. Dengan kondisi perekonomian tersebut, menciptakan masyarakat yang mandiri dalam aspek finansial menjadi semakin sulit. Lebih luas, pengangguran pada akhirnya menyebabkan banyak masyarakat untuk memilih menjadi pengemis atau gelandangan.

Selain itu, ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka setelah pendapatan yang menghilang mengakibatkan tingkat kejahatan yang semakin luas dalam suatu wilayah. Cara-cara ilegal menjadi pilihan para pengangguran untuk mampu memenuhi kebutuhan mereka. Bukan hanya mencuri dan merampok, tetapi juga masyarakat cenderung untuk melakukan penipuan.

Di samping itu, dalam mengurangi kemiskinan pemerintah berupaya untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, yang terlihat dari tingkat pengeluaran pemerintah dalam membeli barang dan jasa. Meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk barang publik tidak secara langsung menyebabkan perluasan kesempatan kerja. Dalam artian bahwa lapangan kerja yang tersedia tergantung kepada jenis pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Kondisi yang sulit dialami oleh masyarakat Barru. Pemerintah kabupaten tersebut setiap tahun berupaya untuk mengurangi tingkat pengangguran dengan menghadirkan

barang publik yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja. Tetapi, bukannya menciptakan barang publik sebanyak mungkin, pengeluaran pemerintah cenderung mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Hingga tahun 2022, pengeluaran pemerintah hanya sebesar 666 miliar rupiah, sangat rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Angka ini menjadi nilai dengan penurunan terbesar dalam 5 tahun terakhir (BPS, 2024).

Permasalahan lain hadir dari peningkatan jumlah populasi yang tidak terkontrol. Sukirno (2006) menemukan bahwa jumlah populasi yang meningkat seharusnya sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja. Jika lapangan kerja yang tersedia tidak bertambah dan, di sisi lain, populasi terus meningkat, dipastikan bahwa pengangguran menjadi tak terkontrol (Sukirno, 2006).

Di sisi lain, penambahan populasi tidak selamanya menyebabkan kerugian dalam perekonomian. Peningkatan populasi seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Amdan & Sanjani, 2023). Jika masyarakat dapat diberikan perlakuan yang baik, mereka dapat menjadi sumber daya yang berkualitas dan menguntungkan dalam perekonomian. Yunker (2024) mengemukakan bahwa populasi dapat menjadi indikator yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan syarat kebijakan pemerintah (*government policy*) yang mampu mendorong produktivitas masyarakat tersebut.

Masyarakat dapat menjadi semakin produktif selama mampu memiliki spesialisasi di bidangnya masing-masing. Dalam artian bahwa pemerintah seharusnya mampu menghasilkan kebijakan yang dapat mengasah dan mengembangkan spesialisasi dari individu-individu dalam masyarakat. Dengan demikian, peningkatan produktivitas yang diharapkan dapat terjadi (Yunker, 2024).

Selain itu, produktivitas dan kualitas masyarakat dapat dilihat dalam perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam suatu daerah. IPM merupakan sebuah nilai yang di standarisasi yang menunjukkan tingkatan dari pembangunan dan dampak ekonomi terhadap kondisi kehidupan manusia dalam suatu daerah atau negara (Ngoc et al., 2023). IPM juga mencakup tentang bagaimana setiap penduduk dapat mengakses hasil dari proses pembangunan seperti pendapatan, kesehatan, dan pendidikan .

Tindakan untuk mengurangi pengangguran tampaknya menemui titik terang setelah IPM Kabupaten Barru menunjukkan sebuah peningkatan yang signifikan dalam 5 tahun terakhir. Hal ini menjadi dasar utama dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran pengeluaran pemerintah, tingkat populasi, dan indeks pembangunan manusia dalam mengurangi tingkat pengangguran.

Selain itu, penelitian terdahulu cenderung melihat pengeluaran pemerintah dan investasi dalam upaya

untuk mengurangi pengangguran (Jamaluddin, 2023; Sukirno, 2006; Todaro, 2000). penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian-penelitian sebelumnya (*research gap*) dengan menambahkan indeks pembangunan manusia sebagai variabel penjelas (*explanatory variable*) dalam mengurangi pengangguran di Kabupaten Barru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan indeks pembangunan manusia dalam upaya untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Barru. Untuk mengetahui hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif (Wooldridge, 2013).

Data yang digunakan dalam penelitian menggunakan basis data runtut waktu (*time series*) sepanjang periode tahun 2000-2022, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (2024) dan Kabupaten Barru (2024). Dalam pendekatan kuantitatif ini, metode *ordinary least square* (OLS) digunakan untuk memahami hubungan antara variabel penjelas dan variabel terikat (*dependen*) dalam model penelitian (Wooldridge, 2013).

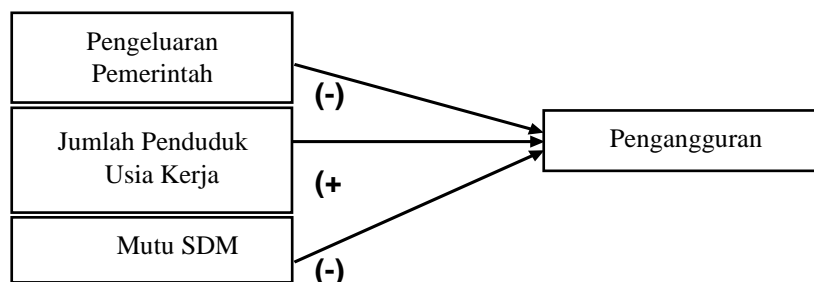
Dalam proses regresi dengan model OLS, penelitian ini melakukan pengujian untuk model regresi tersebut dengan memanfaatkan analisis-analisis dari uji asumsi klasik dan uji hipotesis (Wooldridge, 2013). Model penelitian berikut ini

merupakan hasil adopsi dari penelitian-penelitian terdahulu (Jamaluddin, 2023; Ngoc et al., 2023; Sukirno, 2006).

$$\begin{aligned}
 & \text{Pengguguran}_t \\
 &= \beta_0 + \beta_1 \text{Pengeluaran}_t \\
 &+ \beta_2 \text{Penduduk}_t + \beta_3 \text{MutuSDM}_t + e_t
 \end{aligned}$$

Dimana, t mewakili tahun periode penelitian ($t = 2000, \dots, 2022$). *Pengguguran* mencakup variabel dependen, yang mewakili ukuran dari tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Barru pada tahun t yang diproksikan dengan persentase, sedangkan β_0 merupakan intersep atau konstanta. β_1 adalah vector dari koefisien yang terkait dengan variabel pengeluaran pemerintah, sedangkan *Pengeluaran* merupakan vektor dari variabel penjelas yang mencirikan pengeluaran pemerintah daerah dalam satu periode anggaran Kabupaten Barru pada tahun t yang diukur dengan satuan rupiah dalam bentuk

logaritma natural (Ln). β_2 merupakan vektor dari koefisien yang terkait dengan variabel jumlah penduduk, sedangkan *Penduduk* mengacu kepada vektor dari variabel penjelas yang mencirikan jumlah penduduk usia kerja Kabupaten Barru pada tahun t yang diproksikan dengan satuan jiwa/orang dalam bentuk logaritma natural (Ln). β_3 mewakili vektor dari koefisien yang terkait dengan variabel mutu sumber daya manusia, sedangkan *MutuSDM* adalah vektor dari variabel penjelas yang mencirikan indeks pembangunan manusia Kabupaten Barru pada tahun t yang diproksikan dengan persentase. Terakhir, e_t merupakan *error term* yang mewakili faktor-faktor yang tidak dapat diobservasi dalam model untuk Kabupaten Barru pada tahun t .



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Sumber: (Jamaluddin, 2023; Ngoc et al., 2023; Sukirno, 2006)

**PEMBAHASAN
 PENELITIAN**

Dalam hasil analisis, penelitian ini menunjukkan perkembangan dari

HASIL

variabel-variabel yang digunakan (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Tingkat Pertumbuhan Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, dan Mutu SDM

Tahun	Pertumbuhan Variabel-Variabel (dalam Persentase)			
	Pengangguran	Pengeluaran Pemerintah	Jumlah Penduduk	Mutu SDM
2000	3,04	-	-	-
2001	6,83	143,73	3,73	1,22
2002	7,57	19,20	1,24	1,24
2003	6,72	97,92	2,25	0,05
2004	15,98	46,10	1,85	0,65
2005	13,19	-4,96	3,26	0,71
2006	13,76	90,99	-15,82	1,88
2007	9,5	-15,85	3,27	0,36
2008	10,02	123,50	2,03	0,50
2009	8,61	-32,26	1,30	1,41
2010	8,94	-18,76	-1,21	1,23
2011	5,75	32,20	0,34	0,33
2012	4,78	0,05	1,97	1,36
2013	4,51	10,24	-1,15	0,44
2014	2,3	12,00	4,09	4,32
2015	7,68	38,16	1,03	1,94
2016	7,35	7,41	0,90	1,33
2017	5,6	5,43	0,89	1,58
2018	5,38	-0,80	0,82	1,12
2019	5,79	-0,03	0,58	1,82
2020	6,39	-6,90	5,26	1,23
2021	6,74	-3,74	0,68	0,37
2022	5,32	0,52	0,61	1,03

Sumber: Hasil Analisis Penulis (2024)

Selanjutnya, hasil uji asumsi klasik dari model penelitian yang dibangun terdiri dari hasil uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas (lihat Tabel 2). Seluruh analisis menggunakan aplikasi EViews 10. Pertama, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa residual dari data-data yang digunakan dalam penelitian terdistribusi secara normal dengan nilai probabilitas *Jarque-Bera* sebesar 0,54 atau prob. > 0,05, sehingga memenuhi asumsi normalitas.

Kemudian, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel yang

digunakan dalam model tidak mengalami multikolinearitas yang ditunjukkan dengan nilai *variance inflation factor* (VIF) dari seluruh variabel < 10, sehingga diasumsikan tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji autokorelasi menggunakan pengujian *Breusch-Godfrey*. Hasilnya adalah bahwa model penelitian yang digunakan tidak mengalami gejala autokorelasi dengan nilai prob. 0,36 > 0,05. Terakhir, hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode *white*, dimana model penelitian tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas dengan nilai prob. 0,49 > 0,05.

Tabel2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian	Keterangan	Nilai
Uji Normalitas	Prob. Jarque-Bera	0,54
Uji Multikolinearitas	Variabel: <i>Pengeluaran</i>	3.65
	<i>Penduduk</i>	2.16
	<i>MutuSDM</i>	5.62
Uji Autokorelasi	Prob. Chi-Square(2)	0,36
Uji Heteroskedastisitas	Prob. Chi-Square(8)	0,49

Sumber: Hasil Analisis Penulis (2024)

Berdasarkan pengujian asumsi klasik tersebut, analisis regresi OLS dapat dilakukan. Berdasarkan hasil uji statistik (lihat Tabel 3), terdapat 4 (empat) poin utama yang digarisbawahi. Pertama, ditemukan bahwa *R-squared* model penelitian sebesar 47 persen, yang berarti bahwa variabel-variabel yang digunakan

dalam penelitian cukup kuat untuk menjelaskan variasi dari variabel dependen. Kedua, seluruh variabel penjelas yang digunakan dalam model penelitian berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran, kecuali variabel *MutuSDM* dengan arah negatif.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik

Variabel	Coef.	Std. Error	t-Stat.	Prob.
C	-446.3638	170.6719	-2.615333	0.0170
<i>Pengeluaran</i>	0.032447	0.010330	3.141090	0.0054***
<i>Penduduk</i>	0.365921	0.143212	2.555097	0.0193**
<i>MutuSDM</i>	-0.008651	0.002129	-4.062530	0.0007***
R- squared	0.472486	F-statistic		5.672656
Adjusted R-squared	0.389194	Prob(F-statistic)		0.005996

Catatan: Level signifikansi 1% (***), 5% (**), dan 10% (*)

Sumber: Hasil Analisis Penulis (2024)

Ketiga, tingkat pengeluaran memiliki hubungan signifikan yang positif dengan tingkat pengangguran. Berdasarkan uji statistik, setiap 1 persen peningkatan pengeluaran pemerintah menyebabkan peningkatan pengangguran di Kabupaten Barru sebesar 3 persen. Temuan ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan dan tidak sejalan dengan teori Keynes yang menyebutkan bahwa pemerintah

seharusnya menurunkan angka pengangguran melalui peningkatan pengeluaran-pengeluaran untuk tujuan perekonomian. Alasan paling masuk akal dari hasil ini adalah bahwa kemungkinan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Barru cenderung dialokasikan untuk belanja pegawai, dibandingkan pengeluaran untuk hal produktif seperti belanja modal, barang dan jasa, dan lainnya.

Jamaluddin (2023) menambahkan bahwa pemerintah yang hanya berfokus kepada alokasi pengeluaran untuk hak non-produktif seperti belanja pegawai, hanya menciptakan kemiskinan dalam jangka panjang. Artinya pemerintah melalui kebijakan pengeluaran atau belanja berfokus untuk hal-hal seperti penciptaan lapangan kerja atau pembinaan sumber daya manusia.

Keempat, jumlah penduduk terkait secara positif dengan tingkat pengangguran. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 orang jumlah penduduk di Kabupaten Barru menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran sebesar 36 persen. Hasil ini sejalan dengan studi dari Sari & Pangesty (2022) yang menyatakan bahwa setiap penambahan penduduk dalam suatu kawasan dapat berakibat kepada peningkatan pengangguran. Hal ini dapat terjadi setelah peningkatan penduduk tidak disertai dengan peningkatan ketersediaan lapangan kerja dalam suatu wilayah. Terakhir, mutu sumber daya manusia, yang dalam hal ini diukur dengan IPM, memiliki hubungan yang negatif signifikan dengan pengangguran, yang berarti bahwa setiap sebuah penambahan persentase dari IPM berdampak kepada penurunan tingkat pengangguran. Todaro (2000) menyatakan bahwa modal manusia (*human capital*) menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah seharusnya melakukan investasi ke dalam modal manusia, sehingga pembangunan manusia yang tercermin dari tingkat pendidikan tinggi dan kesehatan yang layak dapat menciptakan produktivitas. Individu-individu yang mendapatkan pendidikan yang tinggi dan kesehatan yang layak cenderung untuk bergerak mandiri dalam memenuhi kebutuhan mereka. Tidak hanya individu tersebut dengan mudah terserap ke dalam dunia kerja, tetapi individu tersebut berkesempatan tinggi untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Pada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Materi pokok bagian ini adalah: (1) rancangan penelitian; (2) teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen; (3) dan teknik analisis data.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kabupaten Baru sebagai daerah yang memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi berupaya untuk mendorong perekonomian dengan memaksimalkan alokasi pengeluaran, jumlah penduduk yang luas, dan kualitas SDM. Penelitian ini mencoba untuk melihat hubungan antara pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan kualitas SDM terhadap tingkat pengangguran. Dengan menggunakan analisis regresi yang dikuatkan dengan pengujian-pengujian terhadap data dan model yang digunakan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel

penjelas (pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan kualitas SDM) memiliki hubungan yang kuat terhadap variabel dependen (tingkat pengangguran).

Berdasarkan hasil analisis, setiap peningkatan dari pengeluaran pemerintah dan penduduk hanya menyebabkan kondisi pengangguran semakin parah di Kabupaten Barru. Alokasi anggaran pengeluaran yang tidak efektif dan hanya berfokus kepada pengeluaran yang bersifat belanja rutin menjadi alasan kondisi tersebut tercipta. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang tidak sejalan dengan pertumbuhan lapangan kerja semakin memperparah situasi pengangguran dan kemiskinan di daerah tersebut.

Meskipun demikian, upaya untuk mengatasi pengangguran yang tinggi dapat dilakukan melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di wilayah tersebut. Perencanaan yang strategis dalam aspek pendidikan dan kesehatan dapat menciptakan sebuah lingkaran ekonomi dan bisnis yang mandiri dan berkelanjutan. Sinergitas antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan lembaga masyarakat menjadi suatu kerja sama yang menguntungkan dalam menciptakan pengangguran yang semakin rendah.

Penelitian ini memiliki batasan terkait data yang hanya tersedia dari tahun 2000, sehingga tidak melihat kondisi Kabupaten Barru sebelum masa reformasi. Selain itu, penelitian ke depannya perlu untuk melihat alternatif lain dalam menurunkan

pengangguran. Artinya adalah bahwa peningkatan IPM dan penciptaan lapangan kerja oleh pemerintah tidak menjadi fokus utama dalam upaya untuk mengatasi pengangguran. Jo (2023) mengungkapkan bahwa mengurangi tingkat pengangguran sukarela dan melakukan skema ulang dalam seleksi tenaga kerja dalam pemerintah dan swasta menjadi pilihan yang bijak untuk mengatasi pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Amdan, L., & Sanjani, M. R. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(1), 108–119.
- Jamaluddin, R. B. (2023). Analisis Pengaruh Upah Minimum, Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 1(1), 70–79.
- Ngoc, A. M., Minh, C. C., Nhu, N. T., Nishiuchi, H., & Huynh, N. (2023). Influence Of The Human Development Index, Motorcycle Growth And Policy Intervention On Road Traffic Fatalities—A Case Study Of Vietnam. *International Journal Of Transportation Science And Technology*, 12(4), 925–936.
- Indonesia. (2024). Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://Bps.Go.Id>
- Pitartono, R., & Hayati, B. (2012).

- Analisis Tingkat Pengangguran Di Jawa Tengah Tahun 1997-2010.* Fakultas Ekonomika Dan Bisnis.
- Sari, S. A. E., & Pangestuty, F. W. (2022). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017–2020. *Journal Of Development Economic And Social Studies*, 1(4), 641–649.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan.* Jakarta: Kencana.
- Todaro. (2000). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Jilid I (I).* Erlangga.
- Wooldridge, J. M. (2013). *Introductory Econometrics 5th Ed.* Cengage Learning.
- Yunker, J. A. (2024). Economic Growth In China And India: The Potential Role Of Population. *World Development Sustainability*, 100130.